

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Sejarah Kabupaten Kotawaringin Timur

Sampit, yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan salah satu pusat wilayah yang memiliki peranan strategis di Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini menonjol tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat, tetapi juga karena letaknya yang strategis, yang menjadikannya sebagai simpul penting dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadikan Sampit memiliki fungsi sentral dalam mendukung pembangunan regional serta memfasilitasi interaksi antarwilayah di provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, berdasarkan peta regional Kalimantan Tengah, posisi Sampit berada di bagian tengah, sehingga menjadi jalur yang lebih dekat bagi masyarakat dari beberapa daerah seperti Buntok, Palangkaraya, Kuala Pembuang, dan Kasongan ketika melakukan perjalanan menuju Pulau Jawa. Kondisi ini secara tidak langsung menguatkan keunggulan komparatif Pelabuhan Sampit dalam mendukung aktivitas ekonomi dari wilayah sekitar Kotawaringin Timur.

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya, sebuah sungai yang memiliki arti penting bagi masyarakat lokal. Dalam bahasa suku Dayak Ot Danum, sungai ini dikenal dengan sebutan *Batang Danum Kupang Bulan*. Penamaan ini mencerminkan keterkaitan budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak dengan lingkungan alam sekitar, sekaligus menegaskan peran Sungai Mentaya sebagai unsur geografis yang menentukan lokasi pemukiman, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial, di Kota Sampit Sungai ini merupakan jalur transportasi utama yang dapat dilalui perahu bermotor, meskipun hanya sekitar 67% areanya yang benar-benar dapat dilayari. Hambatan tersebut disebabkan oleh kondisi morfologi sungai, sedimentasi, alur yang tidak terpelihara, keberadaan gosong atau pasir, serta sisa potongan kayu yang mengganggu navigasi.

Asal-usul nama “Sampit” hingga kini masih menjadi perdebatan. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa istilah tersebut berasal dari bahasa Cina, yaitu angka “31” (sam = 3, it = 1). Istilah itu merujuk pada kedatangan rombongan 31 orang pedagang Cina yang kemudian membuka hubungan dagang serta mengembangkan usaha perkebunan, seperti rotan, karet, dan gambir. Salah satu perkebunan karet terbesar pada masa itu berada di kawasan yang kini dikenal sebagai daerah belakang Golden dan Kodim. Pada kurun 1795-1802 terjadi konflik hebat antara Belanda

dan Inggris yang menyebabkan perpindahan penduduk Sampit ke daerah pedalaman, tepatnya ke Kota Besi. Pemindahan ini dilakukan karena meningkatnya gangguan kelompok bajak laut di wilayah muara Sungai Mentaya. Pada 1836, armada Belanda berhasil menumpas kelompok bajak laut yang dipimpin Koewardt, yang menguasai sekitar 25 perahu di kawasan Teluk Kumai dan Tanjung Puting. Koewardt tewas dalam peristiwa tersebut, dan lokasi makamnya di Ujung Pandaran hingga kini dianggap keramat oleh masyarakat.

Setelah situasi kembali aman, penduduk berpindah ke Seranau (dahulu disebut Benua Usang, kini Mentaya Seberang). Pada masa itu, para pedagang Cina juga mulai bermukim di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan kepercayaan feng shui, sebuah kota sebaiknya menghadap matahari terbit. Karena Seranau menghadap ke arah matahari terbenam yang dianggap kurang baik, masyarakat Cina kemudian membangun pemukiman baru di seberang Seranau, yaitu lokasi yang kini menjadi Kota Sampit. Versi lain mengenai awal mula Sampit muncul dari legenda masyarakat setempat tentang keberadaan Kerajaan Sungai Sampit yang dipimpin Raja Bungsu. Kerajaan ini memiliki dua keturunan, yaitu Lumuh Sampit (laki-laki) dan Lumuh Langgana (perempuan). Dikisahkan bahwa kerajaan tersebut akhirnya runtuh akibat perebutan kekuasaan antara kedua saudara tersebut. Lokasi

kerajaan diperkirakan berada di sekitar kawasan PT Indo Balambit (Desa Bagendang Hilir). Ditemukannya tiang bendera kapal yang terbuat dari kayu ulin serta pecahan keramik pada saat penggalian parit memperkuat dugaan bahwa wilayah itu pernah menjadi pusat Kerajaan Sungai Sampit, yang pada masa lampau telah menjalin hubungan dagang dengan bangsa Cina, India, hingga Portugis.

Diperkirakan Kerajaan Sungai Sampit berdiri pada masa Dinasti Ming (abad ke-13), seiring maraknya aktivitas perdagangan dari Cina menuju wilayah selatan, termasuk Kalimantan. Terdapat pula cerita mengenai kunjungan Putri Junjung Buih, istri Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit, ke kerajaan tersebut. Jika dilihat dari periodisasi sejarah, usia Kerajaan Sungai Sampit bahkan diperkirakan lebih tua dibandingkan Negara Dipa (abad ke-14), sehingga tidak tercatat dalam kitab *Negarakertagama*. Bukti tambahan dalam Traktat Karang Intan menunjukkan bahwa wilayah Sampit pernah menjadi bagian dari daerah yang diserahkan kepada VOC. Selain itu, Sampit juga disebut dalam naskah kuno *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca pada tahun 1365, yang menuliskan catatan perjalanan ekspedisi Majapahit ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sampit dan Kuala Pembuang, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada.

1) Perkembangan Islam di Kotawaringin Timur

Penyebaran Islam pada abad ke-15 menjadi salah satu ciri utama perkembangan sosial-keagamaan di Nusantara. Meskipun kerajaan-kerajaan kecil bercorak Islam telah berdiri di pesisir timur laut Sumatra sebelum tahun 1300, proses islamisasi di Kalimantan baru lebih terlihat pada akhir abad ke-14 ketika Raja Kutai dikatakan sebagai penguasa pertama yang memeluk Islam. Pada periode yang sama, Islam juga berkembang di wilayah Asia Tenggara lain, seperti Sabah pada 1405, Brunei pada 1410, dan Malaka sekitar 1440, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dengan kedatangan kapal-kapal dari Cina. Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa, yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak pada awal abad ke-16. Perdagangan yang terus berlangsung membuat pengaruh Jawa-Hindu tetap terasa di Banjarmasin, Kotawaringin, serta wilayah Kalimantan lainnya, sementara pengaruh Islam dari Brunei semakin kuat sehingga wilayah pesisir di utara akhirnya memeluk Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Bolkiah, penyebaran Islam dari Brunei bahkan mencapai Filipina sebagai wilayah timur terjauh.

Pada awal abad ke-16, agama Islam mulai menyebar lebih intensif di Kalimantan. Pada masa itu pula berdiri kerajaan-kerajaan Islam baru, terutama di Banjarmasin dan

Pasir. Abad ke-16 menjadi masa kejayaan Banjarmasin yang berhasil menguasai pesisir Kalimantan hingga Sambas dan Sukadana di barat serta Kutai dan Berau di timur. Brunei turut berkembang dan memperluas pengaruhnya hingga Pantai Utara Kalimantan, Sulu, dan sebagian Palawan. Masuknya Islam ke Kotawaringin Timur tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan Banjarmasin. Berdasarkan Traktat Karang Intan tahun 1817, Kerajaan Sungai Sampit tercatat sebagai vazal Banjarmasin. Pada tahun 1844, sejumlah besar penduduk di wilayah Kotawaringin Timur telah memeluk Islam, terutama yang tinggal di sepanjang Sungai Mentaya, seperti di Tanah Hambau, Tangar, Kawan Batu, Pahirangan, Sumin, Balirik, Tangkarobah, Tambah, Pamintangan, dan Tumbang Kuayan.

Selain itu, terdapat beberapa bukti lain yang menunjukkan bahwa kehadiran Islam di Kotawaringin Timur telah terjadi lebih awal. Beberapa makam tua di Mentaya Seberang memperlihatkan ciri-ciri pemakaman Islam, termasuk makam Datuk Nabe/Ngabehi (Jaya Kusuma), yang diyakini sebagai pendatang dari Jawa. Pada masa lampau, daerah Seranau (Mentaya Seberang) memang menjadi lokasi pemakaman bagi masyarakat Sampit. Temuan makam tua lainnya berada di Sungai Lenggana, dengan nisan bertuliskan nama H. Abdurrahman bin H. Abdullah Bugis (lahir 11

Muharram 1103 H/26 Juni 1691 M) dan Syekh Basiri bin Sayidullah (wafat 1500 M). Makam-makam di Kota Besi dan Ketapang juga menjadi indikasi masuknya Islam lebih awal ke wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah Putra Arja Jaya (1580-1620) di Kerajaan Banjarmasin, sang Sultan diketahui telah memeluk Islam dan kemudian menginstruksikan seluruh rakyatnya untuk mengikuti ajaran Islam. Mereka yang menolak perintah tersebut memilih mengungsi ke kaki Pegunungan Meratus dan kemudian dikenal sebagai kelompok Orang Bukit. Keinginan Sultan Suriansyah untuk meluaskan penyebaran Islam hingga ke Kalimantan Tengah, termasuk Kotawaringin Timur, sempat terhambat oleh kekhawatiran akan terjadinya konflik karena adanya hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok suku di pedalaman.

Dalam beberapa kasus, proses islamisasi di Kalimantan Tengah memang memunculkan ketegangan. Contohnya, Sultan Mustain Billah (1656–1678) pernah berperang melawan mertuanya, Patih Rumbih, di Pulau Mintin karena penolakannya terhadap pemaksaan masuk Islam. Seperti halnya di Pulau Jawa, penyebaran Islam di Kalimantan juga dilakukan melalui media seni. Kesenian Wayang Banjar dibawa dari Jawa Timur oleh Datu Purbaya pada masa Sultan

Tahlilullah (1679-1700) dengan gelar Ngabehi Surapati Mangkubumi. Seni pertunjukan ini kemudian disempurnakan oleh Datu Kartasura melalui Mantri Kedaton Kyai Masdipura (1824-1919). Sejak saat itu, Islam berkembang secara bertahap ke wilayah Kotawaringin Timur melalui pendekatan budaya. Jejak penyebaran tersebut masih terlihat hingga kini melalui keberadaan kesenian Wayang Banjar, Mamanda, dan Kirik yang tetap hidup sebagai bagian dari tradisi pesisir di Kotawaringin Timur.

2) Zaman Pendudukan Hindia Belanda

Secara historis, keberadaan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemerintahan Majapahit serta masuknya Islam yang mulai berkembang sekitar tahun 1620. Pada masa tersebut, wilayah pesisir selatan Kalimantan Tengah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Kemudian, pada tahun 1679, Kerajaan Banjarmasin membentuk Kerajaan Kotawaringin yang berpusat di wilayah Arut Selatan (kini Kabupaten Kotawaringin Barat). Kerajaan ini mencakup daerah-daerah pesisir Kalimantan Tengah seperti Sampit, Mendawai, dan Kuala Pembuang, sementara wilayah pedalaman tetap dipimpin oleh para kepala suku yang kemudian memilih menarik diri ke daerah hulu. Kehadiran Belanda di Kalimantan mulai tercatat pada tahun 1598, namun

kekuasaan kolonial baru benar-benar menguat pada abad ke-17 ketika Inggris dan Belanda bersaing memperoleh akses perdagangan di wilayah tersebut. Setelah masa kerja sama dagang yang singkat dengan Banjarmasin, Belanda akhirnya berhasil menguasai kota itu pada 1747. Sementara itu, di bagian utara, The British East India Company memperoleh wilayah di Sabah melalui Sultan Brunei pada 1784.

Perubahan signifikan terjadi setelah penandatanganan perjanjian antara VOC dan Sultan Banjar pada 1787, yang membuat wilayah Kotawaringin Timur berada di bawah kendali pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 1917, Belanda mulai mengangkat pejabat pemerintahan dari kalangan pribumi, tetapi tetap berada di bawah pengawasan penuh administratur kolonial. Pada masa tersebut, Kotawaringin Timur berstatus sebagai *Onder Afdeling* Sampit, setara dengan kewedanaan, dan dipimpin oleh seorang kontrolir (*controleur*). Secara geografis, wilayah Kota Sampit memiliki batas-batas yang jelas dengan daerah sekitarnya. Di bagian utara, kota ini berbatasan dengan Kalimantan Barat, tepatnya pada *Onder Afdeling* Sintang. Sementara di sisi timur, batas wilayahnya bertemu dengan Sungai Kahayan yang berada di *Onderafdeling* Beneden Dayak. Di bagian selatan, Kota Sampit berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan

di sisi barat, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat pada *Onder Afdeeling* Kotawaringin. Penentuan batas-batas ini tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berperan dalam menentukan interaksi sosial, ekonomi, serta mobilitas penduduk antarwilayah.

Awalnya, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah sekitar 50.700 km², sama seperti kondisi wilayah sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Wilayah ini dilintasi oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, dan Sungai Katingan, yang semuanya bermuara ke Laut Jawa, sehingga memberikan peranan penting bagi sistem transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Namun, seiring dengan pemekaran administratif yang dilakukan pada tahun 2002, sebagian wilayah Kotawaringin Timur dipisahkan untuk membentuk dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan. Pemekaran ini tidak hanya mengubah batas wilayah, tetapi juga berdampak pada struktur pemerintahan, distribusi sumber daya, dan dinamika sosial-ekonomi di daerah tersebut. Akibat pemekaran tersebut, Kotawaringin Timur hanya mempertahankan Sungai Mentaya sebagai sungai utama yang melewati Kota Sampit, sementara Sungai Seruyan dan Katingan masuk ke wilayah kabupaten baru. Luas wilayah Kotawaringin Timur pun menyusut

menjadi sekitar 17.000 km². Pada masa pemerintahan kolonial, *Onder Afdeling* Sampit berfungsi terutama sebagai pusat aktivitas perdagangan dan industri. Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah peninggalan sejarah, seperti kawasan Pelabuhan Sampit, PT Inhutani III yang sebelumnya dikenal sebagai N.V. Bruynzeel, serta perusahaan Remiling yang bergerak di sektor pertanian.

3) Zaman Pendudukan Fasisme Jepang

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), struktur pemerintahan di *Onder Afdeling* Sampit berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang melalui Borneo Minseibu yang berpusat di Banjarmasin. Pemerintahan lokal dipimpin oleh seorang Bunken Kanrikan dan Gunco. Setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya dengan kekalahan Jepang dari pasukan Sekutu, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jakarta. Namun, karena keterbatasan sarana komunikasi pada masa itu, informasi mengenai kemerdekaan Indonesia baru sampai kepada masyarakat di Sampit dan wilayah Kalimantan lainnya beberapa hari kemudian, tepatnya setelah kedatangan A.A. Hamidan dan A.A. Rivai di Banjarmasin pada tanggal 24 Agustus 1945.

Berita kemerdekaan ini kemudian disebarkan melalui Radio Borneo Simbun di Banjarmasin dan Kandangan, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Selain menyampaikan proklamasi kemerdekaan, siaran radio tersebut juga mengumumkan pengangkatan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan, yang menandai pembentukan struktur pemerintahan regional pasca-kemerdekaan.

Di wilayah Samuda, pemerintahan setempat telah diambil alih oleh Panitia Aksi Kemerdekaan pada 1 September 1945. Dalam situasi darurat pasca-proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Pemerintahan Republik Indonesia Wilayah Samudra yang dipimpin oleh Mohamad Baidawi Udan dengan Ali Badrun Maslan sebagai wakilnya. Pemerintahan ini secara resmi diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1945 melalui upacara pengibaran bendera merah putih disertai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dipimpin oleh Darham Ibu dan berlangsung di pasar setempat. Mulai tanggal 9 Oktober 1945, struktur pemerintahan ini mulai menjalankan fungsinya dari sebuah rumah sederhana yang terletak di Basirih Hilir, dekat Sungai Jejangkit, yang disediakan oleh warga setempat sebagai kantor resmi. Langkah ini menunjukkan upaya masyarakat dan tokoh lokal dalam membangun administrasi

pemerintahan yang efektif, meskipun dalam kondisi terbatas dan penuh tantangan pasca-kemerdekaan.

Berbeda dengan Samuda, pemerintah Jepang di Sampit masih bertahan hingga awal September 1945. Penyerahan kekuasaan secara resmi baru dilakukan setelah kedatangan utusan Jepang dari Banjarmasin. Upacara penyerahan berlangsung di Lapangan Tugu Sampit, dihadiri oleh pegawai pemerintah, guru, kepala kampung, tokoh masyarakat, dan para pelajar. Bunken Kanrikan Nomura Akira bertindak mewakili pemerintah Jepang dan menyerahkan administrasi pemerintahan kepada pihak Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut dilakukan penurunan bendera Jepang dan pengibaran bendera merah putih. Namun, kontrol Republik Indonesia di Sampit sempat diganggu oleh masuknya pemerintahan Belanda/NICA.

Kondisi ini tidak berlangsung lama karena perlawanan rakyat yang kemudian dikenal sebagai “Gerakan Operasi Subuh”. Gerakan ini merupakan aksi gabungan yang melibatkan Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) dan BPRI Sampit, termasuk tokoh Hasyim Djafar, Mohamad Baidowi Udan, Ali Badrun Maslan, unsur TKR Samuda seperti Usman H. Asan dan Majekur Maslan, serta sembilan anggota BPRI yang merupakan rombongan Bung Tomo. Melalui operasi

yang dilancarkan pada subuh hari pukul 04.00 tanggal 29 November 1945, Sampit berhasil direbut kembali.

Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, pada hari yang sama pukul 07.00 pagi dilaksanakan peresmian Pemerintahan Republik Indonesia Wilayah Sampit. Upacara ini ditandai dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di halaman kantor pemerintahan setempat. Kemudian dilaksanakan rapat pembentukan struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Hasyim Djapar hingga akhirnya menetapkan Abdul Hamid Hasan sebagai Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

4) Masa Pendudukan NICA

Pasukan Belanda/NICA yang datang bersama Sekutu dikenal menggunakan taktik yang licik. Pada 7-8 Januari 1946, mereka berhasil merebut kembali pemerintahan Republik Indonesia di Sampit dan Samudra pada saat BPKB sedang menuju Banjarmasin untuk membantu pengusiran pasukan NICA. Meski demikian, situasi tersebut tidak mematahkan semangat perjuangan masyarakat Sampit dan Samuda. Dengan persenjataan yang masih sangat sederhana, masyarakat terus melakukan perlawanan secara bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja

diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Upaya perjuangan ini mencerminkan tekad kuat warga dalam melindungi kedaulatan negara meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan risiko tinggi. Dalam perkembangannya, pada tanggal 17 Oktober 1947, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan satu tim pasukan payung yang berjumlah 14 orang menggunakan pesawat C-47 Dakota RI-002 dari Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Tim ini terdiri dari pemuda-pemuda asal Kalimantan yang dipimpin oleh Mayor Udara Tjilik Riwut, dengan Amir Hamzah bertindak sebagai *jumping master*. Pengiriman pasukan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat pertahanan dan mendukung perjuangan rakyat di daerah-daerah strategis untuk mempertahankan kemerdekaan. Komando pasukan penerjun dipercayakan kepada Letnan Muda Iskandar, dengan M. Dachlan dan J. Bitak sebagai pengganti bila terjadi korban. Sekitar pukul 07.00 pagi, pasukan ini diterjunkan di wilayah hutan Kalimantan, tepatnya di Kampung Sambu antara Sungai Arut dan Seruyan, dekat Rantau Pulut.

Kehadiran pasukan payung tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat Barisan Pertahanan Keamanan Rakyat (BKR) Sampit dalam menghadapi ratusan pasukan KNIL/KL. Bentrokan besar pun tidak dapat dihindari, dan

dalam pertempuran tersebut, tiga anggota pasukan payung gugur, yaitu Kapten Udara Hari Aryadi Sumantri, Letnan Muda Iskandar, dan Sersan Kosasih. Sebagai bentuk penghormatan dan upaya mengenang pengorbanan mereka, pemerintah daerah Sampit menanam “Pohon Beringin Iskandar” di halaman depan Kantor Bupati serta mengabadikan nama-nama mereka pada sejumlah ruas jalan utama di kota tersebut. Langkah ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap jasa pahlawan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat akan semangat perjuangan dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada fase selanjutnya, pemerintahan Republik di Sampit kembali jatuh ke tangan Belanda yang beroperasi di bawah bendera NICA. Situasi ini merupakan bagian dari strategi politik Belanda setelah pertemuan Malino pada 15 Juli 1946, yang kemudian dijadikan dasar pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook. Upaya pembentukan NIS sesungguhnya merupakan taktik kolonial untuk kembali menguasai Indonesia. Rencana tersebut mendapat penolakan keras dari para pejuang Republik, yang menanggapinya dengan perlawanan terbuka terhadap Belanda.

Menghadapi penolakan tersebut, Belanda kemudian menjalankan politik pecah-belah (*divide et impera*) dengan membentuk negara-negara boneka di berbagai wilayah. Melalui Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1947), mereka mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai negara bagian pertama NIS. Setelah itu menyusul pembentukan Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948), serta berbagai satuan politik kecil lainnya. Di Kalimantan, Belanda juga merencanakan pembentukan “Negara Kalimantan” melalui pembentukan daerah otonom yang nantinya digabungkan dalam sistem federasi. Pada periode tersebut, terdapat lima pemerintahan federatif di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, dan Kalimantan Timur. Wilayah Kotawaringin, yang berpusat di Pangkalan Bun, masih berada di bawah pengawasan militer Belanda. Bahkan, pada tanggal 14 Januari 1946, terdapat rencana untuk memasukkan Kotawaringin Barat ke dalam federasi Dayak Besar sebagai bagian dari strategi politik kolonial Belanda. Strategi ini bertujuan untuk memecah wilayah secara administratif serta melemahkan hubungan dan solidaritas antara daerah-daerah tersebut dengan Republik Indonesia yang

baru saja merdeka, sehingga mempermudah kontrol kolonial terhadap wilayah Kalimantan. Walaupun demikian, Dewan Kotawaringin tetap konsisten menolak rencana tersebut. Mereka dengan tegas memperjuangkan agar Kotawaringin tetap berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Sikap itu ditunjukkan melalui berbagai aksi perlawanan sporadis di sejumlah daerah, yang menggambarkan keteguhan masyarakat setempat untuk tidak kembali berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

5) Menjadi Kabupaten Sendiri

Menjelang akhir tahun 1949, Gubernur Kalimantan Dr. Murdjani melakukan kunjungan ke wilayah Kotawaringin bersama Mayor Tjilik Riwut dan sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses integrasi wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada 1 Mei 1950, Kotawaringin secara resmi diterima kembali ke dalam NKRI dengan status sebagai daerah Swapraja Kotawaringin. Namun, tidak lama kemudian, pada 16 April 1950, para tokoh dari Daerah Istimewa Swapraja Kotawaringin mengadakan rapat umum dan menyampaikan mosi bahwa status swapraja dianggap menghambat perkembangan daerah. Oleh karena itu, masyarakat setempat mengajukan desakan kepada Gubernur Kalimantan agar status

swapraja dihapuskan dan wilayahnya dijadikan daerah biasa, sehingga pembangunan dan kemajuan daerah tersebut dapat sejajar dengan daerah Sampit. Menanggapi aspirasi tersebut, pada tanggal 3 Agustus 1950, Gubernur Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menetapkan penyatuan Daerah Kotawaringin (Onder Afdeeling Kotawaringin) dengan tiga kewedanan, yaitu Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara, ke dalam wilayah Pemerintah Daerah Otonom Kotawaringin. Penetapan ini menjadikan Sampit sebagai ibu kota, sekaligus menandai transformasi administratif yang lebih terstruktur dan memberikan kesempatan bagi wilayah tersebut untuk berkembang secara setara dengan daerah lain di Kalimantan. Tekanan masyarakat semakin meningkat dan mosi tambahan turut disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sementara di Yogyakarta. Berdasarkan dorongan tersebut, pemerintah mulai mempersiapkan pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan.

Sebagai langkah awal dalam pembentukan struktur pemerintahan daerah di Kalimantan pasca-kemerdekaan, beberapa daerah sementara dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14 pada tanggal 14

Agustus 1950. Daerah-daerah tersebut mencakup wilayah Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kotawaringin, Barito, Kotabaru, dan Kutai. Tahap perkembangan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 pada tanggal 7 Januari 1953, yang secara resmi mengatur pembentukan daerah otonom tingkat kabupaten dan daerah istimewa tingkat kabupaten/kota besar di Provinsi Kalimantan. Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat struktur administratif yang memungkinkan pengelolaan wilayah secara lebih efektif dan terkoordinasi. Berdasarkan undang-undang ini, sejumlah daerah ditetapkan sebagai kabupaten atau daerah istimewa, termasuk Kabupaten Kotawaringin yang meliputi kewedanan Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara, serta wilayah Swapraja Kotawaringin. Sejak diberlakukannya ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin resmi berkedudukan di Sampit dengan Mayor Angkatan Udara Tjilik Riwut sebagai kepala daerah pertama (1950-1957). Tanggal 7 Januari kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Sampit, menandai momentum penting dalam pembentukan struktur pemerintahan daerah modern di wilayah tersebut.

6) Pemekaran Daerah Otonom

Upaya untuk menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mendorong perlunya penambahan daerah tingkat II di wilayah Kalimantan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membagi beberapa kabupaten otonom lama menjadi beberapa kabupaten tingkat II yang baru serta membentuk kotapraja baru. Pada masa itu, Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin di bawah kepemimpinan Tjilik Riwut juga berkeinginan untuk membagi wilayah Kotawaringin menjadi dua kabupaten dalam lingkup Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Para tokoh perintis kemerdekaan dan masyarakat Kotawaringin mengusulkan agar Kota Sampit dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Usulan tersebut dilandasi oleh sejumlah alasan, antara lain posisi Sampit sebagai kota tua yang memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan NKRI serta perkembangannya sebagai pusat industri kayu sejak masa kolonial Belanda. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Sampit menjadikan kota ini sebagai pintu utama arus barang dan jasa di Kalimantan.

Namun demikian, aspirasi tersebut tidak terwujud karena sebagian besar masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah lebih mendukung penetapan Desa Pahandut yang ketika itu masih termasuk wilayah Kabupaten Kapuas sebagai ibu kota provinsi. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei 1957, melalui sebuah upacara adat yang diprakarsai oleh Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS), Gubernur Milono selaku Gubernur Departemen Dalam Negeri Koordinator Seluruh Kalimantan secara resmi menetapkan Desa Pahandut sebagai Kota Palangka Raya, yang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan ini menandai tonggak penting dalam pengembangan wilayah dan administrasi provinsi. Selanjutnya, peletakan batu pertama pembangunan kota tersebut dilakukan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kota baru yang strategis dan perencanaan tata kota yang modern di wilayah Kalimantan Tengah. Seiring dengan penetapan Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi, wilayah Kotawaringin secara resmi dibagi menjadi dua kabupaten tingkat II. Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi wilayah Kewedanan Sampit Barat (DAS Seruyan), Sampit Timur (DAS Mentaya), dan Sampit Utara (DAS Katingan)

dengan ibu kota di Sampit. Sementara itu, wilayah Kotawaringin Barat yang berasal dari wilayah Swapraja Kotawaringin dan mencakup Kewedanan Kotawaringin berkedudukan di Pangkalan Bun. Kedua kabupaten tersebut kemudian secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Undang-undang ini menegaskan penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 yang mengatur pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan, sehingga memberikan landasan hukum bagi integrasi administrasi kedua kabupaten tersebut ke dalam struktur pemerintahan provinsi. Penerapan undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Tengah.

b) Desa Baampah

Baampah adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Desa ini terletak di bagian utara wilayah Kotawaringin Timur dan berada di kawasan pedalaman Sungai Mentaya. Baampah termasuk salah satu dari 15 desa/kelurahan di Kecamatan Mentaya Hulu. Desa ini memiliki kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau karena dikelilingi

oleh sungai besar dan perkebunan sawit milik perusahaan swasta. Di desa ini sering terjadi banjir besar, rumah rumah warga sering terkena dampak.⁴⁴ Infrastruktur jalan yang kurang memadai serta akses transportasi yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengadakan kegiatan pembelajaran agama secara langsung. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat mulai memanfaatkan internet, terutama YouTube, sebagai media untuk menambah pengetahuan agama.

c) Geografi

Desa Baampah berada pada koordinat sekitar 2.19° LS dan 112.58° BT, dengan ketinggian kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah hutan tropis dan perkebunan, serta berada di jalur perairan yang menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Mentaya. Kecamatan Mentaya Hulu, tempat Baampah bernaung, memiliki luas wilayah sekitar 1.766 km², dengan topografi berbukit ringan dan akses utama melalui jalur darat serta sungai.

d) Administrasi

Secara administratif Baampah termasuk dalam:

Provinsi	: Kalimantan Tengah
Kabupaten	: Kotawaringin Timur
Kecamatan	: Mentaya Hulu

⁴⁴Skripsi milta, pai uin antasari,hal 44

Kode Wilayah Kemendagri : 6202032002

Kode Pos : 74357

Desa Baampah dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada tahun 2025, desa ini dipimpin oleh Ing Sugito sebagai Penjabat Kepala Desa, menggantikan pejabat sebelumnya yang sedang menjalani proses hukum.

e) Demografi dan Perekonomian

Menurut data Kecamatan Mentaya Hulu (2023–2024), jumlah penduduk Desa Baampah adalah:

Total Penduduk : 377 jiwa

Laki-laki : 207

Perempuan : 170

Jumlah RT/RW : 1 RW dan 2 RT

Penduduk Baampah umumnya bekerja di sektor pertanian lahan kering, perkebunan sawit, Perkebunan karet, perikanan Sungai, pedagang kecil, UMKM lokal dan pekerjaan nonformal lainnya.

f) Pendidikan

Di Baampah terdapat satu lembaga pendidikan dasar, yaitu:

SD Negeri 1 Baampah

Status : Sekolah negeri

Jumlah siswa : Sekitar 50 siswa

Kepala sekolah : Yosievina Alsa

Luas tanah sekolah : $\pm 4.154 \text{ m}^2$

Sekolah ini menjadi pusat pendidikan dasar bagi anak-anak di desa dan wilayah sekitarnya.

g) Sosial dan Budaya

Masyarakat Baampah terdiri atas beragam suku, terutama Dayak dan Banjar, dengan tradisi gotong-royong yang kuat. Kegiatan sosial banyak berlangsung di balai desa, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah. Perayaan keagamaan dan adat lokal masih terpelihara dalam kehidupan sehari-hari, terutama kegiatan yang berhubungan dengan upacara tradisional Dayak dan kegiatan keagamaan Islam.

h) Infrastruktur

Akses menuju Baampah dapat ditempuh melalui jalan darat dari Sampit menuju daerah pedalaman Mentaya Hulu. Infrastruktur dasar di desa meliputi: Jalan desa dan akses kendaraan roda dua/empat, balai desa, fasilitas pendidikan (SDN 1 Baampah), jaringan listrik PLN (belum 24 jam di semua titik) dan jaringan seluler dengan kualitas terbatas di beberapa area

i) Bencana dan Lingkungan

Desa Baampah beberapa kali mengalami banjir musiman, terutama pada puncak musim hujan. Salah satu banjir yang terdokumentasi terjadi pada Juni 2020, ketika air naik hingga sekitar 20 cm dan mulai memasuki beberapa rumah warga. Wilayah ini juga

rawan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, seperti sebagian besar kawasan Kalimantan Tengah.

j) Pemerintahan dan Perkembangan Terbaru

Pada tahun 2024-2025, Desa Baampah mengalami pergantian kepemimpinan sehubungan dengan kasus hukum mantan kepala desa. Pemerintah kecamatan kemudian menunjuk Ing Sugito sebagai Penjabat Kepala Desa sambil menunggu proses hukum inkrah. Pemerintah desa bersama Dinas PMD memperkuat tata kelola dan administrasi desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Baampah, ditemukan beberapa poin utama mengenai penggunaan YouTube dalam menuntut ilmu agama:

1. Aktivitas Masyarakat Belajar Agama

Sebelum masyarakat Desa Baampah mengenal dan memiliki akses terhadap internet serta platform media digital seperti YouTube, proses pembelajaran keagamaan berlangsung secara konvensional melalui peran sentral seorang guru agama. Guru tersebut merupakan tenaga pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar setempat, yang sekaligus menjalankan peran sebagai guru mengaji bagi anak-anak dan masyarakat desa. Kegiatan belajar mengaji dilaksanakan secara rutin setiap hari pada waktu siang hingga sore hari.

Proses pembelajaran dimulai pada pukul 13.00 hingga 15.00 dengan fokus utama pada kegiatan membaca Al-Qur'an (mengaji). Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dari pukul 15.00 hingga 17.00 dengan materi penguatan dasar-dasar ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan rukun Islam dan praktik ibadah.

Materi pembelajaran disusun secara terstruktur berdasarkan hari. Pada hari Senin, pembelajaran difokuskan pada ilmu tajwid untuk memperbaiki dan menertibkan bacaan Al-Qur'an. Hari Selasa digunakan untuk mempelajari imla', yakni keterampilan menulis lafaz Arab dengan benar. Selanjutnya, pada hari Rabu, peserta didik dilatih menulis ayat-ayat Al-Qur'an tanpa melihat contoh tulisan, sebagai bentuk latihan daya ingat dan ketelitian. Hari Kamis diisi dengan pembelajaran praktik salat, mencakup rukun-rukun salat serta bacaan yang menyertainya. Pada hari Jumat, kegiatan difokuskan pada penyetoran hafalan Juz 'Amma, sedangkan hari Sabtu dikhususkan untuk kegiatan mengaji tanpa tambahan materi lainnya. Pola pembelajaran ini menunjukkan adanya sistem pengajaran agama yang terjadwal, berkesinambungan, serta menekankan interaksi langsung antara guru dan murid sebagai inti dari proses transmisi ilmu keagamaan.

Pola pembelajaran keagamaan yang terstruktur dan berkelanjutan tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama serta menjadi bagian penting dari kehidupan religius masyarakat Desa

Baampah. Namun, keberlangsungan sistem pengajaran ini tidak terlepas dari dinamika sosial yang terjadi di lingkungan pedesaan. Dalam konteks masyarakat desa, relasi sosial sering kali dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang, persepsi, dan penilaian subjektif yang tidak selalu bersifat positif. Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik antara guru agama tersebut dengan aparat desa setempat. Sekitar empat hingga lima tahun yang lalu, konflik tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan kegiatan mengaji bagi masyarakat umum.

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan hubungan kelembagaan, di mana honor atau gaji yang seharusnya diterima oleh guru mengaji kerap ditahan hingga beberapa bulan. Selain itu, sikap aparat desa yang dinilai kurang ramah dan tidak mendukung semakin memperburuk situasi. Akibatnya, guru agama tersebut mengambil keputusan untuk menghentikan perannya sebagai guru mengaji bagi masyarakat dan memilih untuk memfokuskan diri sepenuhnya pada tugas formalnya sebagai guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar negeri. Keputusan ini menandai berakhirnya pola pembelajaran keagamaan berbasis tatap muka yang sebelumnya mengandalkan hubungan langsung antara guru dan masyarakat, sekaligus menjadi titik awal perubahan dalam dinamika pembelajaran agama di Desa Baampah.

Pasca berhentinya guru agama tersebut, Desa Baampah mengalami beberapa kali pergantian guru agama. Namun, mayoritas guru agama yang datang setelahnya tidak mampu bertahan lama, dengan masa pengabdian yang umumnya hanya berlangsung sekitar satu hingga dua bulan. Kondisi ini terjadi meskipun secara struktural telah terdapat upaya perbaikan dari pihak desa, seperti penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi guru agama serta pemberian honor atau gaji yang relatif lebih layak dibandingkan dengan yang diterima oleh guru sebelumnya. Akan tetapi, peningkatan fasilitas dan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan non-material yang dihadapi.

Faktor utama yang mendorong pengunduran diri para guru agama tersebut berkaitan dengan keterbatasan akses di Desa Baampah, meliputi sulitnya jaringan komunikasi, terbatasnya akses transportasi menuju pusat kota, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar ini menjadi pertimbangan serius bagi para guru agama, terutama dalam konteks keberlanjutan kehidupan sehari-hari dan keamanan sosial. Akibatnya, meskipun dukungan fasilitas telah ditingkatkan, proses transmisi pengetahuan keagamaan secara tatap muka tetap mengalami ketidakstabilan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap melemahnya sistem pembelajaran agama konvensional di Desa Baampah.

Dari kondisi tersebut kemudian muncul dinamika baru dalam pembelajaran agama pada masyarakat Desa Baampah. Ketidakstabilan keberadaan guru agama secara tatap muka mendorong masyarakat untuk mengupayakan alternatif lain guna memenuhi kebutuhan pembelajaran keagamaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berusaha mengakses jaringan internet secara mandiri, hingga pada akhirnya masyarakat mulai mengenal dan menggunakan perangkat modem sebagai sumber utama koneksi jaringan. Hampir seluruh masyarakat memanfaatkan modem sebagai sarana akses internet, meskipun kualitas jaringan yang tersedia belum sepenuhnya stabil dan merata.

Keterbatasan jaringan tersebut mendorong masyarakat untuk mengembangkan pola adaptif dalam memanfaatkan teknologi. Pada waktu-waktu tertentu ketika kualitas jaringan relatif lebih baik, terutama pada malam hari, masyarakat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengunduh (download) video-video kajian agama dari platform YouTube. Video-video tersebut kemudian disimpan dan ditonton kembali secara luring (offline) pada siang hari. Pola ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses pengetahuan keagamaan, dari yang sebelumnya bergantung pada interaksi langsung dengan guru, menjadi pembelajaran berbasis media digital yang bersifat fleksibel, mandiri, dan disesuaikan dengan kondisi infrastruktur lokal Desa Baampah.

Pada siang hari, sebagian masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kerap memanfaatkan waktu luang dengan berkumpul di teras-teras rumah. Aktivitas ini pada awalnya hanya berfungsi sebagai ruang sosial untuk membahas berbagai hal seputar kehidupan sehari-hari dan persoalan pribadi. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas konsumsi konten keagamaan melalui YouTube, topik pembicaraan tersebut turut bergeser. Diskusi informal yang berlangsung di ruang-ruang domestik ini mulai mencakup pembahasan mengenai video-video keagamaan yang telah mereka tonton sebelumnya.

Dalam interaksi tersebut, para ibu rumah tangga saling berdialog dan berbagi (sharing) pemahaman terkait isi ceramah, pesan moral, maupun praktik keagamaan yang disampaikan dalam video YouTube. Proses ini menunjukkan bahwa konsumsi media digital tidak berhenti pada tahap penerimaan individu semata, melainkan berkembang menjadi praktik komunikasi interpersonal yang bersifat kolektif. Melalui dialog dan pertukaran pengalaman tersebut, masyarakat secara tidak langsung membangun pemaknaan bersama terhadap ajaran agama yang mereka akses dari media digital, sehingga pembelajaran agama berlangsung secara sosial meskipun tanpa kehadiran guru agama secara langsung.

2. Respon Masyarakat terhadap Konten Keagamaan di YouTube

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Baampah, terlihat bahwa penggunaan YouTube sebagai sarana

untuk menuntut ilmu agama telah menjadi kebiasaan baru yang cukup kuat di tengah keterbatasan akses terhadap kegiatan keagamaan secara langsung. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konten keagamaan yang mereka tonton tersebut menunjukkan variasi yang cukup besar antarindividu.

Terdapat masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menyaring informasi dari YouTube. Kelompok ini cenderung menerima setiap konten yang ditonton sebagai kebenaran tanpa melakukan pengecekan ulang. Mereka menganggap bahwa semua ceramah agama yang ada di YouTube pasti benar, sehingga tidak mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat antar ulama atau variasi metode penyampaian. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibu Rahmiatun, yang menyatakan bahwa YouTube

“sangat membantu, langsung percaya”.⁴⁵

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian warga, akses mudah terhadap ceramah online membuat mereka cepat merasa terbantu, namun disisi lain juga menunjukkan kecenderungan untuk menerima informasi secara utuh tanpa proses verifikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kemudahan akses yang diberikan YouTube tidak selalu diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan literasi keagamaan yang memadai, sehingga memunculkan risiko salah

⁴⁵Rahmiatun, wawancara dengan masyarakat Desa Baampah 10 Agustus 2025

pemahaman jika tidak diikuti dengan sikap kritis dalam menyimak materi keagamaan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mengakses konten dakwah di YouTube dengan orientasi praktis. Informan cenderung memilih video yang mudah dipahami, berdurasi singkat, dan disampaikan oleh penceramah yang dianggap populer atau menarik secara visual. Pola konsumsi ini menunjukkan bahwa pemrosesan pesan keagamaan lebih dominan berlangsung melalui jalur perifer. Masyarakat menerima pesan dakwah tanpa melakukan pengkajian mendalam terhadap isi materi, rujukan keilmuan, maupun konteks ajaran yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses elaborasi kognitif audiens masih berada pada tingkat yang rendah.

Lebih lanjut, karakteristik YouTube sebagai media audio-visual turut memperkuat kecenderungan pemrosesan perifer tersebut. Visualisasi yang menarik, penggunaan ilustrasi, serta gaya retorika penceramah sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi ketertarikan audiens. Dalam perspektif ELM, faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai *peripheral cues* yang dapat memengaruhi sikap dan pemahaman audiens tanpa melalui proses penalaran yang mendalam. Akibatnya, pesan keagamaan yang diterima lebih mudah diterima secara emosional, tetapi tidak selalu dipahami secara konseptual.

Temuan lapangan ini menunjukkan minimnya interaksi dua arah antara pendakwah dan audiens. Tidak adanya ruang dialog secara langsung membatasi kesempatan audiens untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi pemahaman, atau menguji kebenaran informasi yang diterima. Dalam kerangka ELM, kondisi ini semakin menghambat terjadinya pemrosesan melalui jalur sentral. Audiens tidak didorong untuk berpikir kritis, melainkan hanya menjadi penerima pasif dari pesan yang disampaikan. Akibatnya, pemahaman keagamaan yang terbentuk cenderung bersifat parsial dan tidak komprehensif.

Selain itu, rendahnya literasi media dan literasi keagamaan juga menjadi faktor yang memengaruhi dominannya jalur periferal dalam pemrosesan pesan. Informan pada umumnya tidak melakukan verifikasi terhadap sumber konten dakwah yang dikonsumsi, baik dari segi latar belakang keilmuan penceramah maupun kesesuaian materi dengan ajaran agama yang otoritatif. Dalam konteks ELM, keterbatasan kemampuan ini menyebabkan audiens tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan elaborasi kognitif secara optimal, sehingga jalur periferal menjadi pilihan yang paling mungkin dalam memproses pesan.

Implikasi dari dominannya pemrosesan periferal ini adalah munculnya pemahaman keagamaan yang bersifat tidak stabil dan mudah berubah. Sikap dan pemahaman yang terbentuk dapat dengan mudah dipengaruhi oleh konten lain yang serupa, terutama yang memiliki daya tarik visual

atau emosional yang lebih kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan variasi pemahaman keagamaan di masyarakat, bahkan membuka ruang terjadinya kesalahpahaman atau penyimpangan interpretasi ajaran agama. Dalam perspektif teori Petty, perubahan sikap yang dihasilkan melalui jalur periferai memang cenderung bersifat sementara dan tidak tahan terhadap pengaruh eksternal.

Kesulitan ini biasanya muncul karena keterbatasan literasi digital maupun literasi agama. Beberapa orang yang diwawancarai bahkan menyampaikan bahwa mereka pernah merasa bingung ketika menemukan dua ceramah yang isinya saling bertentangan, sehingga mereka tidak yakin mana ajaran yang harus diikuti. Situasi seperti ini menunjukkan kurangnya pendampingan keagamaan yang memadai di desa tersebut. Di sisi lain, terdapat pula tipe masyarakat yang bersikap lebih selektif dalam memilih konten keagamaan di YouTube. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ebet selaku tokoh masyarakat di Desa Baampah:

"Cukup membantu dan saya tipe orang yang mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran bukan langsung mempercayai".⁴⁶

Kelompok ini biasanya mengecek latar belakang ustaz, melihat kredibilitas kanal, dan membandingkan isi ceramah dengan pengetahuan agama yang sudah mereka miliki. Masyarakat tipe ini

⁴⁶Ebet, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Baampah 10 Agustus 2025

cenderung lebih kritis dan berhati-hati karena menyadari bahwa tidak semua konten YouTube dapat dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan maupun otoritas keagamaan. Sikap selektif ini membantu mereka menghindari kesalahpahaman dan meminimalkan risiko terpengaruh oleh informasi yang tidak valid.

Selain kedua kelompok tersebut, ditemukan pula masyarakat yang menonton video keagamaan bukan karena motivasi untuk belajar secara mendalam, tetapi lebih sebagai hiburan atau pengisi waktu luang. Kelompok ini menonton secara pasif tanpa melakukan pemahaman lebih jauh. Informasi yang mereka serap biasanya hanya sebatas permukaan dan jarang membawa perubahan signifikan terhadap cara mereka menjalankan ajaran agama. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Romlah selaku masyarakat di Desa Baampah, beliau mengatakan:

*“Iya, saya sering nonton video ceramah di YouTube, tapi lebih buat hiburan saja, Nak. Biasanya sambil masak atau istirahat. Saya jarang benar-benar fokus, jadi cuma dengar sekilas-sekilas”.*⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan, yaitu Ibu Romlah, diketahui bahwa ia menonton konten keagamaan di YouTube bukan dengan tujuan untuk mendalami materi secara serius, melainkan lebih sebagai hiburan atau teman saat beraktivitas di rumah. Ia menjelaskan bahwa kebiasaannya adalah menonton sambil memasak atau beristirahat, sehingga perhatian yang

⁴⁷Romlah, wawancara dengan masyarakat Desa Baampah. 10 Agustus 2025

diberikan tidak sepenuhnya fokus. Ibu Romlah cenderung memilih video ceramah yang singkat dan ringan, sehingga informasi yang diterima hanya sebatas pengetahuan umum tanpa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik keagamaannya. Ia menegaskan bahwa tontonan tersebut lebih berfungsi sebagai pengisi waktu luang daripada media pembelajaran agama yang mendalam.

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi variasi pemahaman ini adalah cara kerja algoritma YouTube. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa rekomendasi video yang muncul setelah mereka menonton satu ceramah merupakan hasil pengaturan otomatis dari platform. Jika video pertama berasal dari kanal yang kredibel, maka rekomendasi berikutnya cenderung bermanfaat. Namun, jika yang muncul adalah konten yang bersifat kontroversial atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka masyarakat berpotensi mudah terpengaruh karena tidak memiliki kemampuan menyaring informasi tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa YouTube memang menjadi media yang sangat membantu masyarakat Desa Baampah dalam memperoleh pengetahuan agama, terutama karena keterbatasan akses terhadap kegiatan keagamaan secara langsung. Namun, efektivitas media ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan memverifikasi isi video yang mereka tonton. Perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman

keagamaan, dan kemampuan literasi digital menjadi faktor utamanya. Dengan demikian, meskipun YouTube memberikan ruang belajar yang luas, tetap dibutuhkan pendampingan dan edukasi dalam menyaring informasi agar masyarakat tidak hanya menerima pengetahuan secara mentah, tetapi mampu memahami dan mengamalkannya dengan benar.

Pemahaman masyarakat Desa Baampah terhadap konten keagamaan di YouTube menunjukkan adanya variasi dalam cara mereka menerima dan mengelola informasi. Sebagian masyarakat cenderung menerima isi ceramah secara apa adanya tanpa melakukan klarifikasi atau evaluasi lebih lanjut, sehingga posisi mereka lebih menyerupai pendengar pasif. Jika ditinjau melalui perspektif teori dialektika Socrates, keadaan tersebut mengindikasikan bahwa proses dialektis belum sepenuhnya terbentuk, karena menurut Socrates pengetahuan idealnya lahir melalui dialog dua arah, pengujian argumen, dan rangkaian pertanyaan yang mendorong individu untuk menggali makna secara mendalam. Proses *maieutic* atau “kebidanan pengetahuan” hanya dapat terjadi apabila seseorang aktif menguji dan mempertanyakan informasi yang diterimanya.

Sikap kritis ini tampak pada informan seperti Bapak Ebet yang berupaya memverifikasi kebenaran materi sebelum menyukainya, sehingga menunjukkan adanya unsur dialektika Socratic di tingkat individu, meskipun belum menjadi praktik umum di seluruh masyarakat. Dalam konteks bapa Ebet pembelajaran agama, jalur

sentral tercermin ketika masyarakat tidak hanya menerima materi dakwah secara pasif, tetapi juga berupaya memahami dalil, konteks ajaran, serta dasar keilmuan yang melandasinya. Proses ini biasanya didukung oleh adanya diskusi, kesempatan bertanya, serta kemampuan literasi keagamaan yang memadai. Dengan demikian, menurut teori Petty, jalur sentral merupakan jalur pemrosesan pesan yang ideal dalam membangun pemahaman keagamaan yang mendalam, rasional, dan bertanggung jawab.

Dinamika Menuntut Ilmu Agama dengan Media YouTube pada Masyarakat Desa Baampah Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, teori resepsi membantu menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Baampah memahami dan menafsirkan kajian agama yang mereka tonton melalui YouTube. Kondisi masyarakat Desa Baampah sebagai wilayah pedalaman yang relatif memiliki keterbatasan akses terhadap ulama dan kegiatan pengajian tatap muka secara intensif dapat memengaruhi cara masyarakat menerima pesan-pesan keagamaan dari ruang digital. Dalam situasi terbatasnya ruang klarifikasi secara langsung kepada tokoh agama lokal, masyarakat berpotensi mengandalkan interpretasi pribadi atau interpretasi kelompok berdasarkan pemahaman yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, resepsi masyarakat terhadap konten YouTube menjadi faktor penting untuk dianalisis, terutama dalam melihat apakah masyarakat menerima kajian secara utuh, menegosiasikan makna sesuai

konteks lokal, atau bahkan menolak isi tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan nilai yang diyakini. Inilah fase sintesis, yaitu cara belajar baru yang memadukan teknologi dengan kehati-hatian dalam beragama. Namun, pada masyarakat seperti Ibu Romlah yang hanya mendengarkan video sambil melakukan pekerjaan, proses dialektika ini belum mencapai sintesis dan masih berhenti pada tahap antitesis karena pemahamannya belum terbentuk secara mendalam.

3. Efisiensi YouTube dalam Menambah Pengetahuan Agama

YouTube dianggap sebagai media yang sangat efisien dalam menambah pengetahuan agama bagi masyarakat Desa Baampah karena memberikan kemudahan akses yang tidak dapat mereka peroleh melalui metode pembelajaran tradisional. Efisiensi ini terutama terlihat pada fleksibilitas waktu dan tempat, di mana masyarakat dapat mengakses kajian keagamaan kapan saja tanpa terikat pada jadwal pengajian tertentu. Kondisi geografis desa yang terpencil, minim transportasi, serta sulitnya mendatangkan pendakwah membuat YouTube menjadi alternatif utama yang paling realistis untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Dengan hanya menggunakan jaringan internet dan perangkat smartphone, warga dapat mengakses ceramah dari berbagai ulama, lembaga pendidikan Islam, hingga kajian dari pesantren atau tokoh agama nasional yang sebelumnya tidak mungkin mereka jangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, ia menyampaikan bahwa:

“ya sangat membantu, soalnya lebih hemat. Nggak perlu keluar ongkos ke pengajian, cukup pakai kuota sudah bisa nambah pengetahuan agama.”⁴⁸

Selain itu, efisiensi YouTube juga terlihat dari keragaman bentuk penyajian materi. Masyarakat dapat memilih konten sesuai kebutuhan, seperti ceramah singkat, penjelasan ayat Al-Qur'an, pembahasan fiqih dasar, sejarah Islam, hingga tanya jawab keagamaan. Algoritma YouTube yang memberikan rekomendasi video serupa turut membantu pengguna menemukan konten lanjutan, sehingga proses belajar menjadi lebih berkelanjutan. Hal ini membuat masyarakat desa tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terdorong untuk memperdalam tema tertentu melalui video-video penguat yang direkomendasikan platform.

Efisiensi YouTube juga tampak dari sifatnya yang interaktif. Walaupun tidak ada tatap muka langsung, fitur komentar, tombol like, serta kolom diskusi memungkinkan pengguna untuk bertanya, berbagi pengalaman, atau membaca penjelasan tambahan dari sesama penonton. Beberapa kanal dakwah bahkan menyediakan sesi live streaming yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara real time, sehingga interaksi yang terjadi dapat sedikit menggantikan kehadiran ustad secara fisik.

Dari sisi ekonomi, penggunaan YouTube juga jauh lebih efisien. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi,

⁴⁸Ahmad, wawancara dengan masyarakat Desa Baampah 10 Agustus 2025

konsumsi, maupun biaya kegiatan keagamaan lainnya seperti ketika menghadiri majelis taklim. Cukup dengan kuota internet atau jaringan Wi-Fi, masyarakat sudah dapat memperoleh ilmu agama secara terus-menerus. Hal ini sangat membantu masyarakat Baampah yang sebagian besar bekerja di sektor perkebunan dan memiliki keterbatasan waktu serta pendapatan. Dengan demikian, efisiensi YouTube dalam menambah pengetahuan agama terletak pada kemudahan akses, kelengkapan materi, fleksibilitas, biaya yang rendah, serta kemampuan platform ini menjangkau kebutuhan masyarakat yang hidup di wilayah terpencil. YouTube tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi berfungsi sebagai media pembelajaran keagamaan yang adaptif terhadap konteks sosial-geografis Desa Baampah.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih konten dakwah yang bersifat praktis, berdurasi singkat, dan disampaikan dengan gaya komunikatif. Popularitas penceramah, tampilan visual, serta jumlah penonton menjadi indikator utama dalam menentukan pilihan konten. Pola ini memperlihatkan bahwa konsumsi konten keagamaan melalui YouTube lebih berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan dibandingkan pada kualitas substansi keilmuan.

Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran agama di tengah masyarakat merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam konteks ini, YouTube berperan sebagai medium penyebaran pesan keagamaan yang menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta variasi konten yang luas. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan media ini tidak selalu diiringi dengan proses pemahaman yang mendalam terhadap materi keagamaan yang disampaikan. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, Elaboration Likelihood Model (ELM) yang dikemukakan oleh Petty dan Cacioppo menjadi kerangka teoretis yang relevan dalam menganalisis cara masyarakat memproses pesan dakwah yang disajikan melalui platform digital.

4. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan YouTube sebagai Media Pembelajaran.

a) Dampak Positif

- 1) Meningkatkan akses terhadap ilmu agama tanpa harus mendatangkan ustadz atau pendakwah ke desa.

Penggunaan YouTube memungkinkan masyarakat Desa Baampah memperoleh pengetahuan agama dari berbagai sumber yang kredibel meskipun berada di daerah yang jauh dari pusat pendidikan Islam. Keterbatasan transportasi, sulitnya akses jalan, serta biaya tinggi untuk menghadirkan ustaz ke desa menjadi hambatan besar bagi aktivitas keagamaan. YouTube hadir sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan ulama-ulama nasional, dai terkenal, akademisi, maupun

guru-guru pesantren melalui ceramah dan kajian yang dapat diakses tanpa batas. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya kekurangan akses kini dapat memperoleh materi keagamaan yang sama dengan masyarakat di daerah perkotaan.

- 2) Memberikan fleksibilitas dalam belajar, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan waktu mereka.

Salah satu keunggulan utama YouTube adalah fleksibilitas waktu. Masyarakat tidak perlu mengikuti jadwal khusus seperti halnya menghadiri majelis taklim. Video dapat dihentikan, diputar ulang, atau dilanjutkan kapan saja sesuai kebutuhan. Hal ini sangat membantu masyarakat Baampah yang sebagian besar bekerja sebagai buruh kebun dan memiliki jam kerja yang tidak menentu. Dengan fleksibilitas ini, proses belajar agama dapat dilakukan pada waktu luang, malam hari, atau saat tidak bekerja. Ketersediaan ribuan video ceramah bertema ringan hingga berat juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk belajar secara bertahap, sesuai kemampuan mereka masing-masing.

- 3) Memudahkan masyarakat dalam memahami ajaran agama dengan metode yang lebih interaktif

Pembelajaran agama melalui YouTube menjadi lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan karena disajikan

dalam bentuk audio visual yang menarik dan komunikatif. Banyak konten dakwah yang menggunakan ilustrasi, animasi, tampilan visual yang dinamis, serta gaya penyampaian yang jelas dan mudah diikuti. Penyampaian seperti ini membuat materi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melalui bacaan atau ceramah konvensional.

Selain itu, banyak kanal dakwah modern mengemas ajaran agama dengan bahasa yang sederhana, contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta gaya penyampaian yang sesuai dengan budaya digital masyarakat saat ini. Pendekatan ini membantu meningkatkan ketertarikan dan pemahaman, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga bagi masyarakat yang mungkin sulit memahami penjelasan teks atau ceramah formal. Dengan demikian, metode audio visual yang interaktif ini dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran beragama secara lebih natural pada berbagai kelompok masyarakat.

Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran agama memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Baampah. Media ini membuka akses yang lebih luas terhadap ceramah para ulama yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan keagamaan dengan lebih mudah.

Fleksibilitas YouTube juga menjadi keunggulan karena masyarakat dapat menonton materi keagamaan kapan saja, menyesuaikan dengan aktivitas mereka sehari-hari sebagai petani atau nelayan. Selain itu, bentuk penyajian yang bersifat audio visual memudahkan masyarakat memahami materi, bahkan lebih efektif dibandingkan membaca teks, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah diterima. Dalam konteks teori Hegel, fitur audiovisual ini dapat dipahami sebagai bentuk sintesis yang memadukan cara belajar tradisional seperti mendengarkan ceramah dengan metode digital yang menawarkan visual, animasi, dan infografis, sehingga menghasilkan bentuk pembelajaran baru yang lebih efektif.

b) Dampak Negatif

- 1) Masyarakat cenderung menerima informasi secara pasif tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran isi video.

Salah satu kelemahan media digital adalah kecenderungan pengguna untuk menerima informasi begitu saja tanpa proses *tabayyun* (klarifikasi). Banyak masyarakat yang belum memiliki literasi digital dan literasi agama yang memadai, sehingga mereka tidak terbiasa membandingkan informasi dari berbagai sumber. Akibatnya, perbedaan pendapat antar-ulama atau konten ajaran yang bersifat sensitif sering diterima sebagai kebenaran tunggal. Sikap pasif ini

dapat memunculkan kesalahpahaman, fanatisme, bahkan konflik pemahaman antarmasyarakat apabila konten yang ditonton tidak sesuai dengan tradisi keagamaan setempat.

- 2) Tidak semua konten yang tersedia sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang benar, sehingga ada resiko penyebaran informasi yang kurang tepat.

YouTube merupakan platform terbuka, sehingga siapa pun dapat mengunggah video tanpa proses kurasi atau verifikasi. Hal ini membuka peluang munculnya konten-konten yang berisi penafsiran keagamaan yang keliru, ajaran yang ekstrem, atau pandangan yang tidak sesuai dengan *manhaj* ulama yang *mu'tabar*. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan analisis yang kuat berisiko terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang atau pemahaman agama yang tidak proporsional. Dalam konteks Desa Baampah yang sebagian masyarakatnya memiliki latar belakang pendidikan agama terbatas, risiko ini menjadi semakin besar.

- 3) Kurangnya interaksi langsung antara guru dan murid dalam proses pembelajaran dapat mengurangi pemahaman yang mendalam.

Pembelajaran agama tradisional biasanya dilakukan melalui proses *talaqqi*, yaitu belajar langsung dari seorang guru yang bisa memberikan penjelasan, koreksi, dan

bimbingan. Dalam pembelajaran melalui YouTube, tidak ada proses dialog langsung, sehingga masyarakat tidak dapat bertanya terkait hal-hal yang belum mereka pahami. Keterbatasan ini menyebabkan pemahaman ilmu agama hanya berada pada tingkat permukaan, tidak mendalam, dan tidak terarah. Kekurangan interaksi ini juga dapat menyebabkan kesalahan penafsiran karena masyarakat menafsirkan sendiri materi yang disampaikan tanpa pendampingan ahli.

Penggunaan YouTube juga memiliki beberapa dampak negatif. Sebagian masyarakat menerima informasi secara pasif tanpa melakukan verifikasi, sehingga proses dialektika dalam pandangan Socrates tidak terjadi dan pengetahuan yang diperoleh menjadi kurang teruji. Risiko kesalahpahaman juga cukup besar karena YouTube merupakan platform terbuka di mana siapa saja dapat mengunggah konten dakwah tanpa mekanisme kurasi yang ketat. Selain itu, tidak adanya interaksi langsung antara guru dan murid menghilangkan nilai *talaqqi* yang menjadi tradisi penting dalam pembelajaran agama. Dalam perspektif materialisme dialektik Marx, algoritma YouTube yang mengatur konten berdasarkan ketertarikan visual dan pola tontonan dapat mendorong masyarakat mengonsumsi informasi yang tidak selalu sesuai kebutuhan rohani. Karena itu, proses penyaringan dan sikap kritis menjadi penting agar masyarakat mampu memilah konten

yang benar dan menghindari potensi penyimpangan pemahaman keagamaan.